

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN *e*-SPT PPN TERHADAP EFISIENSI
PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK
(Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak
pada KPP Madya Pekanbaru)**

OLEH

**SITI RABIAH
NIM. 10973005717**



**JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM SI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN *e*-SPT PPN TERHADAP EFISIENSI PENGISIAN SPT MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK (Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Pekanbaru)

Oleh: Siti Rabiah

*Penelitian ini dilaksanakan pada akhir bulan Januari sampai dengan akhir Juni 2013 yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Populasi penelitian ini adalah Wajib PPN yang menggunakan fasilitas *e*-SPT PPN yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru, dengan sampel yang diambil adalah sebanyak 100 responden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT. Hipotesis yang diajukan adalah penerapan *e*-SPT PPN berpengaruh positif terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggunakan instrument untuk mengumpulkan data. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap Wajib PPN (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarlang langsung kepada Wajib PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Dari 100 set kuesioner yang disebarlang telah kembali 100 set kuesioner tanpa ada yang hangus sehingga seluruhnya dapat dipergunakan.

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan *e*-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak. Variabel penerapan *e*-SPT PPN memberikan pengaruh sebesar 33% terhadap variabel efisiensi pengisian SPT, dan sisanya 67% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.*

Kata kunci: *e*-SPT PPN, efisiensi pengisian SPT

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi penulis yang berjudul **“Pengaruh Penerapan e-SPT PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak (Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Pekanbaru)”** dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Shalawat beriring salam untuk nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan untuk kehidupan umat di dunia menuju akhirat dengan mengharapkan ridha dan keberkahan Nya dalam segala hal perbuatan serta amalan kehidupan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan fikiran yang penulis terima dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil. Untuk itu, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. M. Nazir Karim** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

2. Bapak **Dr. Mahendra Romus, SP. M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Bapak **Dony Martias, SE. MM** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak **Ferizal Rahmad, SE. MM** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Ibu **Desrir Miftah, SE. MM. Ak** selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan semangat dan arahan untuk kemajuan dalam meningkatkan prestasi perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu **Dosen beserta Karyawan Tata Usaha** Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Kepada Pimpinan **Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau** yang telah memberikan rekomendasi atau izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, serta Bagian Humas yang telah banyak membantu penulis.

8. Kepada Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, serta Staff dan seluruh Karyawan **Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru** yang telah banyak membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian berupa data dan informasi dari penelitian ini.
9. Teristimewa buat **kedua orang tua tercinta Ayahanda Kallok dan Ibunda Lamming**, yang telah banyak berkorban demi pendidikan yang penulis jalani.
10. Kepada **kakak-kakak tersayang Kak Harisah, Kak Badariah, S.Pd., Bang Ambok Assek, Bang Muhammad Aras, dan Bang Muhammad Husin, ST. beserta keluarga besar**, yang telah memberi *support* yang besar kepada penulis.
11. Kepada **sahabat-sahabat terdekat Lia Citra Paramita** yang sejak kecil hingga sekarang selalu setia memberikan perhatian disaat susah dan senang kepada penulis, dan terkhusus buat **Fh. Kurnia Kusuma** yang selalu memberikan motivasi dan perhatian kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan **jurusan Akuntansi angkatan 2009, khususnya buat Nurfiah, SE., Suhelda Fitriani, SE., Warisa Hasrianti, Yayuk Sugiarti**, teman-teman se-angkatan **Konsentrasi Akuntansi Perpajakan**, teman-teman kampus berbagai jurusan dan angkatan, serta masih banyak lagi yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi semangat kepada peneliti untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan telah memberikan penulis pengalaman-pengalaman hidup semasa perkuliahan.

13. Teman-teman **Kost Pondokan Solihin dan Kost Buk Is/Pak RT** (**Kak Fitrianis, A.Mf., Kak Vivi Elpira, S.Pd., Kak Siti Kholipah, S.Si., Kak Susilawati, S.Pd., Fitriana, S.Sos., Fina Erfiyanti, S.Ap., Sri Darmasari, Irma Agustriyani, Ima Yulianti, Dian Fajarsari, S.Pd., Lili Herawati, Khairunnisa Al Khairi, Nidya Gusnita, SE., Hesti Panora, S.Pd., Vani Damayanti, Zulaiha, dan Devi Nurhani** yang telah memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan.

14. Teman-teman **KKN TEMATIK angkatan 36 tahun 2009 di Desa Rempak, Kecamatan Sabak Auh, Siak** (**Siti Murni, Endah Setiyorini, S.Ap., Puji Lestari, Yulidar Nismawati, Afri Yunita, Rahma Yuni, Khori, S.Ap., Jairul Anwar, dan Muhammad Azril**) terimakasih atas kesan hidup yang luar biasa yang takkan bisa penulis lupakan.

Semoga Allah SWT meridhai dan memberikan balasan untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari akan adanya kesalahan dan ketidak sempurnaan yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, walaupun demikian adanya semoga hasil penelitian dan pemikiran yang dituangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2013

Penulis,

SITI RABIAH
NIM. 10973005717

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Pengertian Wajib Pajak	12
2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT).....	13
2.1.3.1 Pengertian SPT.....	13
2.1.3.2 Fungsi SPT	14
2.1.3.3 Jenis SPT.....	15
2.1.3.4 Pengisian, Penyampaian, Prosedur, dan Pembetulan SPT	16
2.1.3.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT	20
2.1.3.6 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT	23
2.1.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (<i>e-SPT</i>).....	25
2.1.4.1 Pengertian <i>e-SPT</i>	25
2.1.4.2 Tujuan dan Kelebihan <i>e-SPT</i>	25
2.1.4.3 Jenis, Tata Cara Penggunaan dan Fasilitas <i>e-SPT</i>	27
2.1.4.4 Tata Cara Pelaporan dan Prosedur Penyampaian <i>e-SPT</i>	30
2.1.4.5 Tata Cara Pembetulan	32
2.2 Teori Efisiensi	32
2.3 Teori Persepsi.....	33
2.4 Teori Urgensi	34

2.5	Tinjauan Pajak dan Efisiensi dalam Pandangan Islam.....	35
2.5.1	Pengertian Pajak Menurut Syari'at	35
2.5.2	Pandangan Islam tentang Efisiensi.....	37
2.6	Penelitian Terdahulu	37
2.7	Kerangka Pemikiran.....	41
2.8	Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN	44
3.1	Objek Penelitian	44
3.2	Desain Penelitian.....	44
3.3	Populasi dan Sampling Penelitian.....	46
3.3.1	Populasi	46
3.3.2	Sampel.....	46
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	47
3.4.1	Variabel Penelitian	47
3.4.2	Definisi Operasional Penelitian.....	48
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	49
3.5.1	Teknik Pengumpulan Data	49
3.5.2	Teknik Pengolahan Data	50
3.6	Instrument Penelitian	51
3.6.1	Uji Kualitas Data.....	51
3.6.1.1	Uji Validitas	51
3.6.1.2	Uji Reliabilitas	52
3.6.2	Uji Normalitas	53
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	53
3.6.3.1	Uji Heteroskedastisitas.....	53
3.6.3.2	Uji Autokorelasi.....	54
3.7	Teknik Analisis Data.....	54
3.7.1	Analisis Regresi Sederhana.....	55
3.7.1.1	Uji Hipotesis (Uji-t)	56
3.7.1.2	Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)	57
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	58
4.1	Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak	58
4.2	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya	58
4.2.1	Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya.....	58
4.2.2	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru	63
4.2.3	Uraian Jabatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru	65

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
5.1	Hasil Penelitian	69
5.2	Pengujian Instrument Penelitian	69
5.2.1	Uji Kualitas Data	69
5.2.1.1	Uji Validitas	69
5.2.1.2	Uji Reliabilitas	71
5.2.2	Uji Normalitas	72
5.2.3	Uji Asumsi Klasik	73
5.2.3.1	Uji Heteroskedastisitas.....	73
5.2.3.2	Uji Autokorelasi	75
5.3	Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	75
5.3.1	Pengujian Hipotesis (Uji-t).....	77
5.3.2	Pengujian Koefisiensi Determinasi (R^2)	78
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
6.1	Kesimpulan	79
6.2	Keterbatasan.....	79
6.3	Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan (Lingga: 2012).

Peran sektor Perpajakan bagi pendapatan Negara saat ini cukup besar, dan menjadi salah satu andalan bagi penerimaan kas Negara. Pemerintah Indonesia berupaya dalam hal sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sekarang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sangat berbeda. Hal ini terlihat dari pelaksanaan laporan bulanan dan laporan tahunan serta pengurusan administrasi perpajakan yang sekarang ini telah direformasi perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan yang baik sekarang ini menjadi hal yang menarik dan sudah merupakan kewajiban di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Gambaran umum dari instansi pemerintah hingga saat ini dipandang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, terlebih lagi dengan kesan dan pola kerja modern dalam melayani masyarakat.

Konsep modernisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarananya (perangkat keras dan perangkat lunak) hingga kepada modernisasi dari petugas pajak itu sendiri. Hal ini sangat terasa ketika Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan ketika Wajib Pajak melakukan pelaporan perpajakan, di mana telah terdapat modernisasi. Kita lihat sekarang ini untuk pelaporan dan pendaftaran perpajakan dengan cara *e-regitration*, *e-filling*, *e-SPT* dan sebagainya, yang kesemuanya untuk memudahkan Wajib Pajak dan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya kepada negara. Memang masih terlihat kekurangan dalam sistem administrasi perpajakan modern sekarang ini, namun kekurangan tersebut dari waktu ke waktu secara terus menerus dilakukan perubahan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Sistem

pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para Wajib Pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Dalam Sari, (2012:3) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal (3) menyebutkan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyampaian pajak (SPT) merupakan suatu kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dengan benar oleh setiap Wajib Pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak (SPT) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet yang dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk pelayanan pajak berbasis internet adalah penerapan sistem *electronic*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. Pengguna *electronic* ini dilakukan bertujuan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban pajak dapat lebih mudah dilaksanakan dan bertujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai menurut Novarina dalam Sari (2012:4).

Menurut Rahayu dalam Sari (2012:4), pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Teknologi *electronic* ini mampu memudahkan mereka

dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic* mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi pengisian SPT melalui sistem *electronic* ini tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya misalnya, disebabkan karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan pajak (SPT) secara *electronic* tersebut.

Selain itu, mengingat pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah *e-SPT* yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan *e-SPT* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Salah satu penelitian mengenai penerapan *e*-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan *e*-SPT tersebut. Menurut hasil penelitian **Ita Salsalina Lingga (2012)** yang berjudul **Pengaruh Penerapan *e*-SPT (PPN Masa) terhadap Efisiensi Pengisian SPT (PPN Masa) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya** diperoleh kesimpulan bahwa penerapan *e*-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut serta uraian permasalahan diatas telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *e*-SPT khususnya *e*-SPT PPN, untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pengisian SPT dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak, dengan judul penelitian **Pengaruh Penerapan *e*-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Madya Pekanbaru.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa, untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan khususnya bagi peneliti tentang penerapan *e*-SPT PPN dan sejauh mana efektivitas dari penerapan *e*-SPT.
2. Bagi lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada KPP Madya Pekanbaru, dapat digunakan sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan *e*-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan sejauh mana efektivitas dari penerapan *e*-SPT.
3. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan *e*-SPT.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai bahan yang melandasi tulisan ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian kerangka pemikiran dan Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian atau perusahaan atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti sejarah singkat berdirinya perusahaan atau instansi, visi dan misi, susunan organisasi serta uraian fungsi dan tanggung jawab masing-masing jabatan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini telah diuraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi seputar deskripsi dari objek yang diteliti, penjelasan atau pembahasan mengenai hasil perhitungan atau analisis data dengan metode analisisnya serta interpretasi hasil. Bab ini akan menjawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran yang hendak disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2009:2) adalah:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannaya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Supramono (2010:2) pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontrapsepsi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Soemitro dalam Gusfahmi (2007:25) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak:

1. Pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
3. Pajak merupakan iuran dari rakyat yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Mardiasmo (2009:21) disebutkan bahwa:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Soemitro (2004:59) menjelaskan pengertian wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif. Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif merupakan subjek pajak dan subjek pajak yang merupakan wajib pajak, subjek pajak tersebut harus memenuhi syarat objektif, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri.

Selain itu pengertian wajib pajak juga dijelaskan secara ringkas oleh Fidel (2010:136) yaitu subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri. Dengan kata lain, Wajib Pajak

adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.3.1 Pengertian SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siti Resmi (2009:44) juga memaparkan tentang pengertian Surat pemberitahuan yaitu merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengisian SPT yang benar, lengkap dan jelas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Benar artinya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT, dan
3. Jelas artinya melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPT. (Lingga: 2012)

2.1.3.2 Fungsi SPT

Menurut Siti Resmi (2009:44-45) fungsi SPT dapat dilihat dari sisi Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, dan dari sisi Pemotong atau Pemungut Pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek pajak
 - c. Harta dan kewajiban, dan
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan

jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.3.3 Jenis SPT

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.03/2009, SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau *e-SPT*. Berdasarkan waktu pelaporan (Lingga: 2012), SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
2. SPT Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2.1.3.4 Pengisian, Penyampaian, Prosedur Penyelesaian, dan Pembetulan SPT

1. Pengisian dan Penyampaian SPT

Menurut Resmi (2009:48) tata cara pengisian SPT diatur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

2. Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2009:30) prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah:

1. Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harus mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir SPT tersebut.
2. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
3. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
 - a. Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan

lain yang diperlukan untuk menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.

- b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak.
- c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pembetulan SPT

Menurut Rahayu (2010:174) terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Cara membetulkan SPT ialah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis
2. Mengisi SPT pembetulan yang baru

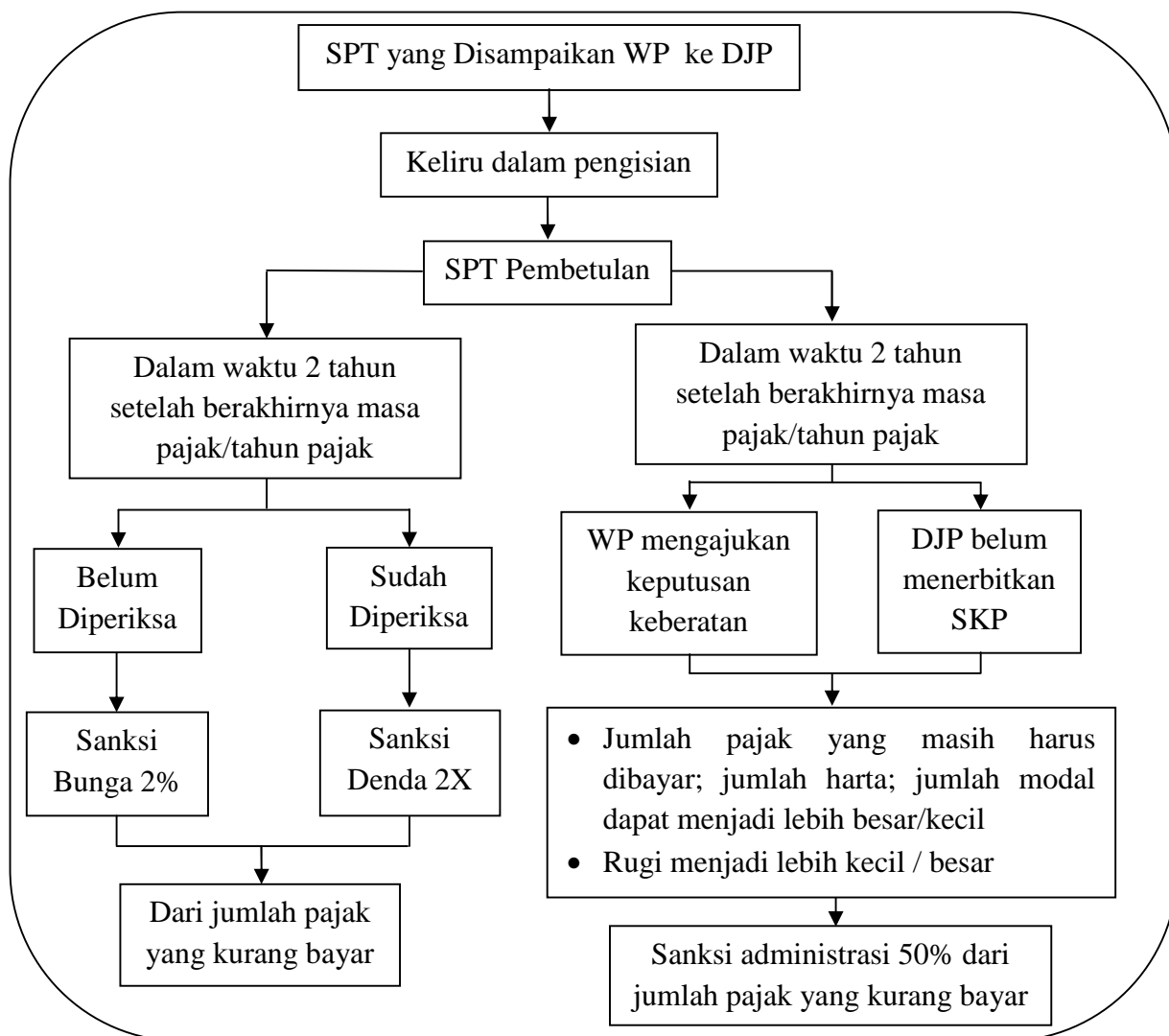
Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, maka terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkannya dalam suatu laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang mengakibatkan sebagai berikut:

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar/lebih kecil; atau
2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besar; atau
3. Jumlah harta menjadi lebih besar/lebih kecil; atau
4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

Gambar 2.1 Pembetulan SPT

Sumber: Lingga, *Laporan Penelitian Akuntansi* (2012)

2.1.3.5 Batas Waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

1. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas penyampaian SPT dalam Mardiasmo (2009:33) adalah sebagai berikut:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Dalam Mardiasmo (2009:34) Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Secara langsung
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. Dengan cara lain, yang meliputi:
 - a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. *E-Filling* melalui ASP

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

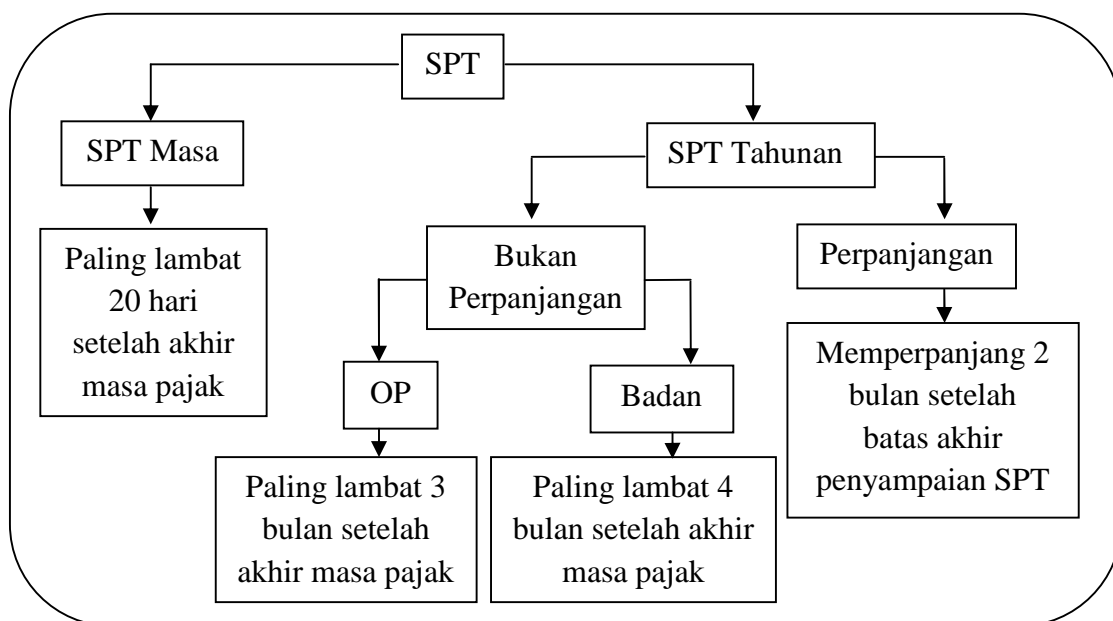
Dalam Mardiasmo (2009:33) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksudkan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT tahunan.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

1. Penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaian diperpanjang.
2. Laporan keuangan sementara, dan
3. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Dalam hal Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Gambar 2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT



Sumber: Lingga, *Laporan Penelitian Akuntansi* (2012)

2.1.3.6 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Dalam Mardiasmo (2009:34) Apabila surat Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
- b. Rp 100.000,- (seratus rupiah) untuk Surat Pemberitahuan lainnya,
- c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
- d. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

1. Kealpaan

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2. Kesengajaan

Setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

2.1.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (*e*-SPT)

2.1.4.1 Pengertian *e*-SPT

Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat (Lingga: 2012).

Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan *e*-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian *e*-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi *e*-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan meng-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.4.2 Tujuan dan Kelebihan *e*-SPT

1. Tujuan *e*-SPT

Tujuan diterapkannya *e*-SPT dalam Lingga (2012) ialah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.

2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan *e-SPT* terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digilirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia.
6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

2. Kelebihan *e-SPT*

Pada <http://www.pajak.go.id/node/15> beberapa kelebihan penggunaan *e-SPT* adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.

2. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.1.4.3 Jenis, Tata Cara Penggunaan dan Fasilitas *e-SPT*

1. Jenis *e-SPT*

Saat ini jenis-jenis aplikasi *e-SPT* yang tersedia di Kantor Pusat sampai KPP Madya yaitu:

1. *e-SPT* Masa PPh

Aplikasi yang tersedia adalah *e-SPT* Masa PPh 21 1721 sesuai PER-53/PJ/2009.

2. *e-SPT* Tahunan PPh

Saat ini tersedia aplikasi *e-SPT* Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009 dan *e-SPT* Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai PER-34/PJ/2009.

3. *e*-SPT Masa PPN

Aplikasi yang tersedia adalah *e*-SPT Masa PPh 21 1721 sesuai PER 53/PJ/2009.

2. Tata Cara Penggunaan *e*-SPT

Menurut Keputusan Dirjen Pajak KEP-383/PJ./2002 dalam Lingga (2012), tentang tata cara dalam penggunaan aplikasi *e*-SPT oleh setiap wajib pajak sebagai berikut:

1. WP melakukan instalasi aplikasi *e*-SPT pada sistem komputer. Aplikasi dapat diperoleh dari *Account Representative* (AR) masing-masing atau dari installer *e*-SPT.
2. WP menggunakan aplikasi *e*-SPT untuk merekam data-data antara lain identitas WP, bukti potong, faktur pajak, dan data perpajakan lain.
3. WP yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan masing-masing dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki ke dalam aplikasi *e*-SPT dengan berpedoman kepada format data sesuai dengan aplikasi *e*-SPT.
4. WP mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. WP mencetak formulir Induk SPT menggunakan aplikasi *e*-SPT
6. WP menandatangani formulir hasil cetakan aplikasi *e*-SPT
7. WP membentuk data *e*-SPT dengan menggunakan aplikasi *e*-SPT dan disimpan dalam media komputer (CD/flash disk).

8. WP melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa Formulir induk SPT hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer.

3. Fasilitas *e-SPT* Masa PPN

Fasilitas yang tersedia dalam aplikasi *e-SPT* Masa PPN sebagai berikut:

1. Perekaman data SPT beserta lampirannya

Sistem *e-SPT* menyediakan fasilitas perekaman data SPT dan lampirannya dan melakukan perhitungan-perhitungan secara otomatis pada saat perekaman serta sinkronisasi data lampiran dan SPT Induk.

2. Perekaman data SPT Pembetulan beserta lampirannya

Sistem *e-SPT* menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pembetulan.

3. *User Profiles*

Sistem *e-SPT* memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai tanggung jawabnya.

4. Memelihara data Wajib Pajak Lawan transaksi

Sistem *e-SPT* memiliki fasilitas untuk merekam dan memelihara data wajib pajak lawan transaksinya.

5. Impor data lampiran

Sistem *e-SPT* memiliki kemampuan untuk mengimpor data faktur pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data faktur pajak hasil ekspor dari terminal sistem *e-SPT* lainnya.

6. Generate data digital SPT

Untuk menghasilkan data digital SPT yang akan diberikan ke KPP dalam bentuk CD atau flashdisk atau dikirimkan secara online.

2.1.4.4 Tata Cara Pelaporan dan Prosedur Penyampaian e-SPT

Tata cara pelaporan dan prosedur penyampaian *e-SPT* berdasarkan Dasar Hukum KEP - 383/PJ/2002 dalam Lingga (2012) dan (<http://www.pajakonline.com>) adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi *e-SPT* pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
2. Wajib pajak menggunakan aplikasi *e-SPT* untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a. Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b. Bukti pemotongan/pemungutan PPh.
 - c. Faktur Pajak
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
 - e. Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.

3. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi *e-SPT* dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi *e-SPT*.
4. Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi *e-SPT*.
6. Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi *e-SPT*.
7. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* dan disimpan dalam media elektronik (disket, CD, flash disk dsb).
8. Wajib Pajak melaporkan SPT secara langsung dengan menggunakan media elektronik ke KPP dengan membawa formulir Induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Melalui *e-filling* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Wajib Pajak melaporkan SPT elektronik secara langsung ke KPP dengan membawa formulir Induk SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan *e-SPT* yang telah ditandatangani dengan membawa Berita Acara Serah Terima Informasi SPT yang dikirim secara elektronik. Sedangkan melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat

dianggap sebagai tanda terima SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan sedangkan atas penyampaian melalui *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

2.1.4.5 Tata Cara Pembetulan

Menurut Modul Sosialisasi *e-SPT* oleh DJP dalam Lingga (2012), cara pembetulan *e-SPT* adalah:

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*).
2. Pembetulan atas SPT yang disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (*e-SPT*) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

2.2 Teori Efisiensi

Seringkali kita berbicara mengenai dua kata yang sering dibicarakan secara bersamaan. Kata **Efektif** dan **efisiensi**. Dimana ada kata efektif pasti juga ada kata efisien. Kita harus tahu makna dari masing-masing dari kedua kata tersebut. Misalnya dalam kalimat dengan penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau dengan penggunaan secara efektif dan efisien dapat mengurangi pemborosan energi. Efektif dan efisien tersebut menjadi kata yang tidak terpisahkan.

Arti kata **efisien** menurut [kamus besar bahasa Indonesia](#) dalam Wibisono, yaitu *tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak*

membuang-buang waktu, tenaga, biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, ber tepat guna.

Sedangkan menurut Wibisono, Agus definisi dari efisien yaitu *penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum.* Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima.

Kemudian menurut Sidarta dalam Ardiansyah, efisien adalah *pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media dan sarana.*

2.3 Teori Persepsi

Persepsi merupakan keadaan *integrated* dari individu terhadap *stimulus* yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Menurut Walgito dalam Efelina (2012) menjelaskan **pengertian persepsi** merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan, kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindra. Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam

diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu, akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan, bahwa persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia kemudian diproses dan dikategorikan dalam suatu gaya tertentu atau dengan kata lain persepsi adalah interpretasi terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan yang bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama, tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berfikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadi perbedaan persepsi pada setiap individu.

2.4 Teori Urgensi

Urgensi berasal dari bahasa latin *Urgere* - {kata kerja} yang berarti mendorong, dalam bahasa Inggris *Urgent* - {kata sifat}, dalam bahasa Indonesia *Urgensi* - {kata benda}. Istilah urgensi menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus di tindak lanjuti. “*Urgensi*” bisa berarti “penting nya”. Misalnya “urgensi kepemimpinan muda” itu lebih berarti “pentingnya kepemimpinan muda”. (Bakhtiar: 2012).

Sedangkan definisi *Urgensi* menurut arti kata ialah keharusan yang mendesak; hal sangat penting: *meningkatkan disiplin*. Menurut Komara (2009), *disiplin* adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan

yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.

2.5 Tinjauan Pajak dan Efisiensi Dalam Pandangan Islam

2.5.1 Pengertian Pajak Menurut Syari'at

Dari berbagai definisi pajak secara umum baik itu dari sektor ekonomis maupun yuridis yang telah dibahas sebelumnya, di dalam pemahaman Islam (Syariat) juga dijelaskan mengenai pajak seperti yang di uraikan oleh Gusfahmi (2007:27) yaitu sebagai berikut:

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب، يضرب، ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

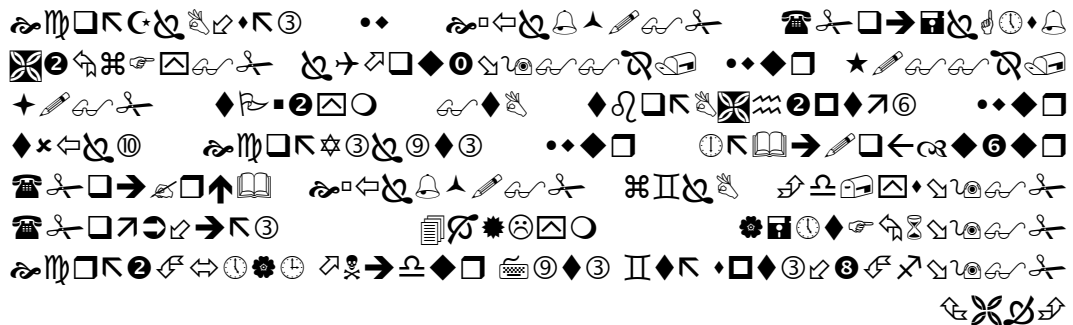
Dalam Al-Quran, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah [2]:61:

وَلَمَّا كَسَتْ سُدُورُهُمْ قُلُوبَهُمْ وَنَضَوْنَ بِهِنَّ اَيْدِيَهُمْ فَلَمَزَنَاهُمْ بِقُلُوبِهِمْ اُولَٰئِكَ ذٰلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ

Artinya: lalu dilimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (ضريبة), yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib* (ذرايب). Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalah adh-dharaaib*.

Adapun mengenai pajak dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 29.

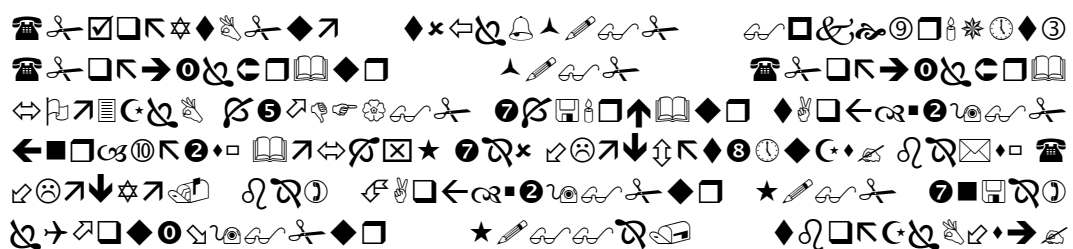


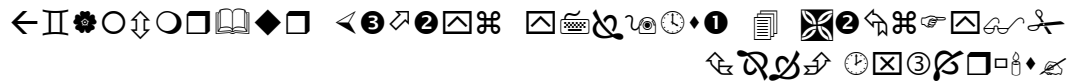
Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”

Yang dimaksud dengan jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

Perintah dari Ulil Amri (pemerintah) wajib di taati selama menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemashalatan bersama.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa’ : 59.

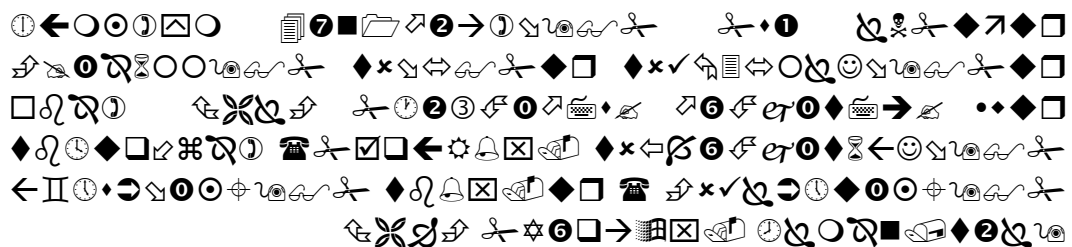




Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepada Ulil Amri dari (kalangan) kamu ...*” (An-Nisa: 59).

2.5.2 Pandangan Islam tentang Efisiensi

Adapun ayat-ayat Al-Quran yang dapat dijadikan acuan mengenai efisiensi terdapat pada surat Al-Isra', ayat 26-27 yang berbunyi:



Artinya: “*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

Dari ayat diatas bermakna bahwa adanya perintah agar kita tidak membuang-buang harta (biaya) secara boros yang mana kita harus efisiensi dalam menggunakan dan mengelola harta.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai penerapan *e*-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan *e*-SPT tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Veronika T Sitompul (2010)	Pengaruh Penerapan Elektronik SPT PPN (<i>e</i> -SPT PPN) terhadap Tingkat Kepuasan Pengusaha Kena Pajak Pengguna Aplikasi <i>e</i> -SPT PPN (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Bandung Karees)	Variabel X: Penerapan <i>e</i> -SPT PPN Variabel Y: Tingkat Kepuasan PKP	Penerapan <i>e</i> -SPT mempunyai korelasi yang kuat dan positif terhadap tingkat kepuasan PKP pengguna <i>e</i> -SPT PPN, ditunjuk oleh angka hasil korelasi yang kuat sebesar 0,884 dengan $t_{hitung} 12,55 > t_{tabel} 2,91$.
2	Dhea Akadita Pratiwi (2011)	Pengaruh Penerapan <i>e</i> -SPT dan <i>e-Filling</i> terhadap Kepuasan Wajib Pajak	Variabel X: Penerapan <i>e</i> -SPT Variabel Y: Kepuasan Wajib Pajak	Penerapan <i>e</i> -SPT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak. Besarnya pengaruh yang disumbangkan variabel penerapan <i>e</i> -SPT ialah sebesar 62,2%.
3	Rahmania Enfar (2011)	Pengaruh Penerapan <i>e</i> -SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Pegawai Pajak	Variabel X: Penerapan <i>e</i> -SPT Variabel Y: Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan	Terdapat pengaruh penerapan <i>e</i> -SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan menurut persepsi pegawai pajak, ditunjuk dengan hasil $t_{hitung} 4,292 > t_{tabel} 1,895$.
4	Rusbiyanti Sripeni (2011)	Pengaruh Penerapan <i>e</i> -SPT (Masa PPN) terhadap Efisiensi	Variabel X: Penerapan <i>e</i> -SPT (Masa	Penerapan <i>e</i> -SPT (Masa PPN) memiliki pengaruh yang

		Pengisian SPT (Masa PPN) menurut Persepsi Wajib Pajak	PPN) Variabel Y: Efisiensi Pengisian SPT (Masa PPN)	signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT (Masa PPN) di KPP Madya Bandung dengan hasil $t_{hitung} 9,498 > t_{tabel} 1,993$ dan signifikan sebesar 0,000. Besarnya pengaruh yang disumbangkan variabel penerapan <i>e-SPT</i> terhadap efisien pengisian SPT yaitu sebesar 55%.
5	Zahra Purnama (2011)	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT	Variabel X ₁ : Penerapan <i>e-SPT</i> Variabel X ₂ : Penerapan <i>e-Filling</i> Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh signifikan antara variabel penerapan <i>e-SPT</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan persentase pengaruh sebesar 12,95%. 2. Terdapat pengaruh signifikan antara penerapan <i>e-Filling</i> terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan persentase pengaruh sebesar 14,78%.
6	Ita Salsalina Lingga (2012)	Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung	Variabel X: Penerapan <i>e-SPT</i> Variabel Y: Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan	Penerapan <i>e-SPT</i> berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi sebesar 36,4%.
		Pengaruh Penerapan <i>e-SPT</i> PPN terhadap Efisiensi Pengisian	Variabel X: Penerapan <i>e-SPT</i> PPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>e-SPT</i> PPN dan efisiensi pengisian SPT

		SPT menurut Persepsi wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya	Variabel Y: Efisiensi Pengisian SPT	<p>menurut persepsi wajib pajak sudah baik karena sudah memenuhi 4 aspek pada penerapan <i>e-SPT</i> yaitu urgensi diterapkannya penerapan <i>e-SPT</i>, tujuan penerapan <i>e-SPT</i>, sosialisasi kepada wajib pajak, dan kendala dalam penerapan <i>e-SPT</i> dan 3 aspek pada efisiensi pengisian SPT yaitu kecepatan, keakuratan, dan efisiensi ruang penyimpanan.</p> <p>2. Terdapat pengaruh yang signifikan pada Penerapan <i>e-SPT</i> PPN terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut Persepsi Wajib Pajak dengan signifikan sebesar 0,009 dan besarnya persentase pengaruh sebesar 16,6%.</p>
7	Siti Khairani (2012)	Analisis aplikasi <i>e-SPT</i> PPN pada Kantor Konsultan Pajak Maidy Palembang	Variabel X: <i>e-SPT</i> PPN Variabel Y: Kebutuhan Wajib Pajak	Penerapan <i>e-SPT</i> PPN berpengaruh terhadap kebutuhan wajib pajak menurut persepsi wajib pajak sebesar 28,9% dan aplikasi <i>e-SPT</i> PPN sebagai bagian dari modernisasi perpajakan tidak cukup berpengaruh terhadap peningkatan

				kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban-kewajiban perpajakan.
--	--	--	--	---

2.7 Kerangka Pemikiran

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menjadi tulang punggung pendapatan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan kehidupan bangsa ini. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi dan adanya ketidakpuasan dari masyarakat atas layanan perpajakan yang diberikan selama ini. Oleh karena itu untuk memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi perpajakan yang meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan, hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang sudah sedemikian canggih.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah elektronik SPT (*e-SPT*) merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh

Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dimana aplikasi *e-SPT* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.
2. Mempermudah dalam menghitung SPT dan pembuatan laporan perpajakan.
3. Mudah dan efisien dalam pelaporan perpajakan.

Tetapi aplikasi *e-SPT* ini juga memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain:

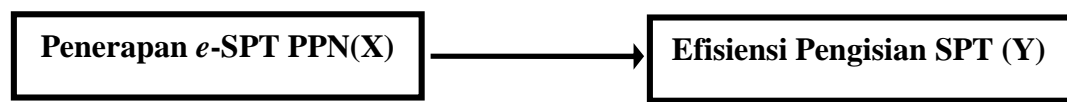
1. Kurang mampu dalam melakukan sinkronisasi format data dengan format data yang diinginkan oleh sistem *ASP (Application Services Provider)* dan sistem *DJP (Direktorat Jenderal Pajak)*.
2. Tidak adanya layanan tambahan untuk mengkonversi data yang diperlukan oleh Wajib Pajak.
3. Pelaksanaan sosialisasi mengenai *e-SPT* tidak merata, sehingga kurangnya informasi mengenai kegunaan dan cara menggunakan aplikasi *e-SPT*.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai dari *DJP*.
5. Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia *DJP* dalam pengoperasian sistem *e-SPT*.

Adalah penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena

secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil.

Jika menurut persepsi para Wajib Pajak penerapan *e*-SPT selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan *e*-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT sehingga pengisian SPT menjadi efisien.

Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ketiga, maka hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut:

Diduga terdapat pengaruh secara signifikan antara Penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian (Lingga: 2012). Subjek dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah menerapkan *e*-SPT PPN yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan *e*-SPT PPN dan efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan *e*-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Untuk mendapatkan data peneliti menyebarkan angket/kuesioner dengan cara kuesioner disebarkan secara langsung di KPP Madya Pekanbaru terhadap Wajib Pajak PKP yang datang untuk melaporkan pajak.

3.2 Desain penelitian

Menurut Sugiyono (2003:7) dalam Lingga, penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang diambil dan dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditentukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Menurut Prasetyo (2005:143), penelitian survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian survei sehingga menyusun kuesioner dengan skala *interval Likert*, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju.

2 = Tidak Setuju.

3 = Ragu-ragu atau Netral.

4 = Setuju.

5 = Sangat Setuju.

Skala *Likert* dikatakan interval karena pernyataan Sangat Setuju mempunyai tingkat atau preferensi yang lebih tinggi dari Setuju dan Setuju lebih tinggi dari Ragu-ragu.

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif (hubungan) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2003:11) dalam Lingga. Penelitian ini mempunyai tingkatan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Melalui penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini digolongkan ke dalam hubungan kausal yaitu terdapat variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2003:37).

Peneliti menggunakan data kuantitatif, yaitu menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2003:105) dalam Lingga, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti.

3.3 Populasi dan Sampling Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:61), menyatakan bahwa populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib *e*-SPT PPN di wilayah KPP Madya Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru jumlah PKP yang menerapkan *e*-SPT PPN adalah sebesar 871 PKP.

3.3.2 Sampel

Sugiyono (2010:62), menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili).

Menurut Arikunto dalam skripsinya Hasibuan (2011:57), mengatakan bahwa cara menentukan besarnya sampel adalah bila subjeknya kurang dari 100

orang lebih baik diambil semua dan jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Adapun menurut Roscoe dalam buku Sugiyono (2010:74) ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 responden. Dengan mempertimbangkan keterbatasan jangka waktu penelitian dan waktu yang dapat disisihkan oleh calon responden untuk mengisi kuesioner, penulis menetapkan jumlah sampel 100 responden yaitu diambil sebesar 10-15% dari jumlah populasi.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Agar penelitian ini terarah maka perlu ditentukan variabel–variabel berdasarkan hipotesis yang akan diteliti. Ada variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Bebas atau Independent Variable (X).

Menurut Sugiyono (2010:4) variabel bebas adalah merupakan variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Data informasi yang menjadi variabel bebas atau independent adalah Penerapan *e*-SPT PPN. Indikator variabel ini adalah:

- a. Urgensi diterapkannya sistem *e*-SPT.
- b. Tujuan penerapan sistem *e*-SPT.
- c. Sosialisasi kepada wajib pajak.
- d. Kendala dalam penerapan *e*-SPT.

2. Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y).

Menurut Sugiyono (2010:4), Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena

adanya variabel bebas. Data informasi yang menjadi variabel dependen adalah efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak. Indikator variabel ini adalah:

- a. Kecepatan.
- b. Keakuratan.
- c. Efisiensi Ruang Penyimpanan/Pengarsipan.

3.4.2 Definisi Operasional Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini didasarkan pada model yang sudah umum digunakan yaitu skala Likert karena teknik yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif menjadi suatu urutan dan data kuantitatif adalah dengan teknik *Summate Rating Method Likert Scale*. Pengukuran skala ini dilakukan dengan cara menetapkan bobot, kemudian menambahkan untuk mendapatkan suatu jumlah dari masing-masing indikator yang hendak diukur.

Untuk mengukur variabel independen dan dependen, maka dilakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak. Kedua variabel penelitian tersebut dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Nomor Pernyataan
X (Penerapan <i>e</i>-SPT PPN)	Urgensi diterapkannya <i>e</i> -SPT	Skala Likert dengan pilihan 1 – 5	Ordinal	1, 2, 3, 4
	Tujuan penerapan <i>e</i> -SPT		Ordinal	5, 6, 7, 8
	Sosialisasi kepada Wajib Pajak		Ordinal	9, 10, 11
	Kendala dalam penerapan <i>e</i> -SPT		Ordinal	12, 13, 14
Y (Efisiensi Pengisian SPT)	Kecepatan	Skala Likert dengan pilihan 1 – 5	Ordinal	15, 16
	Keakuratan		Ordinal	17, 18
	Efisiensi Ruang Penyimpanan		Ordinal	19, 20

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka

Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Data empiris yang diperlukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu dengan bertanya jawab langsung pada pihak yang berkompeten seperti bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI), bagian seksi Pelayanan dari KPP Madya Pekanbaru guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan penerapan *e-SPT PPN*.
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

3.5.2 Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah dalam melakukan proses pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Editing

Yaitu langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner (angket) yang telah dikumpulkan dari responden. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam kuesioner.

2. Coding

Pemberian kode ini bertujuan untuk memudahkan peneliti saat melakukan analisis. Pemberian kode terhadap jawaban, artinya menaruh angka pada tiap jawaban, dari hasil pertanyaan yang bersifat tertutup akan memberikan alternatif jawaban yang bersifat ordinal, artinya

terdapat gradasi dan jenjang. Tabel di bawah ini menyajikan pemberian kode untuk jawaban pertanyaan tertutup:

Tabel 3.2 Kode/Kategori Jawaban Kuesioner

Jawaban	Kode
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3. Tabulasi

Yaitu dengan memasukkan data (angka-angka) ke dalam tabel yang sesuai dengan kebutuhan, setelah itu mengatur angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori. Dalam hal ini menggunakan tabel frekuensi, sehingga dapat diketahui jumlah responden yang menjawab pertanyaan tertentu.

4. Analisis Data

Merupakan serangkaian proses pengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meringkas data sehingga mudah dibaca dan memberikan arti pada data tersebut.

3.6 Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Uji Validitas

Menurut Jogiyanto (2007:123) dalam Lingga, validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tersebut semakin

mengenai pada sasarannya. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Product Moment* dengan bantuan SPSS.

Dalam Hartono (2008:219), kriteria yang digunakan untuk menentukan valid tidaknya alat test apabila jumlah sampelnya sebanyak 100 adalah 0,195 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila nilai indeks validitas suatu alat test $> 0,195$ (r kritis) maka alat test tersebut dinyatakan valid.
2. Apabila nilai indeks validitas suatu alat test $< 0,195$ (r kritis) maka alat test tersebut dinyatakan tidak valid (gugur).

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skala pengukuran artinya pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama akan memberikan hasil yang sama dengan beberapa kali pengukuran selama aspek yang diukur tidak berubah (Kuncoro, 2003:154) dalam Lingga (2012). Secara empiris tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas.

Pengujian reliabilitas menggunakan teknik koefisien *Cronbach Alpha* (α) dengan bantuan SPSS. *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain (Sekaran, 2006:177) dalam Lingga (2012). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,6$.

3.6.2 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006:110) dalam Lingga, *uji normalitas* bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki *distribusi normal*. *Uji normalitas* digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam model *regresi linier sederhana*, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* () yang berdistribusi normal.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. *Uji normalitas* dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan *tes parametrik* adalah pengamatan harus dilakukan pada populasi yang berdistribusi normal. *Uji normalitas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode grafik normal *Probabiltiy Plot*. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi *homoskedastisitas*, tetapi jika tidak, maka terjadi *heteroskedastisitas*.

Metode yang digunakan untuk menguji *heteroskedastisitas* dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Analisis dari grafik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3.2 Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier sederhana ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Menurut Santoso dalam Imam Ghozali (2005), cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Caranya adalah sebagai berikut:

Jika DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif

Jika DW -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi

Jika DW -2 berarti terdapat autokorelasi negatif

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam Lingga (2012), analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis.

Analisis data dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

3.7.1 Analisis Regresi Sederhana

Menurut Gujarati dalam Ghozali (2006:85) dalam Lingga (2012), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Menurut Sugiyono (2010:260), manfaat dari hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak.

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Persamaan umum regresi sederhana adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y= Variabel dependen (efisiensi pengisian SPT)

X= Variabel independen (penerapan *e*-SPT PPN)

a= *Intercept* atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada saat X = 0 sebesar a.

b = *Koefisien regresi* yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X akan mengakibatkan perubahan terhadap Y sebesar b . Nilai b positif menunjukkan hubungan yang searah antara *variabel dependen* dengan *variabel independen*, artinya peningkatan dan penurunan *variabel independen* akan mengakibatkan peningkatan dan penurunan *variabel dependen*. Nilai b negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah antara *variabel dependen* dengan *variabel independen*, artinya peningkatan dan penurunan *variabel independen* akan mengakibatkan penurunan dan peningkatan *variabel dependen*.

3.7.1.1 Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji-t dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyajikan dan menganalisis data dengan menggunakan analisis uji-t yang diolah dengan bantuan program SPSS.

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji-t karena ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan atau menjelaskan perbedaan antar kelompok dalam suatu situasi yaitu untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat dengan cara membandingkan p value dengan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang dipergunakan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat kebenaran ($n-2$), yang memiliki arti bahwa kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas sebesar 95% atau toleransi kesalahan dalam penarikan kesimpulan sebesar 5%.

Kriteria penerimaan atau penolakan H_0 adalah sebagai berikut:

- H_0 ditolak jika $p \text{ value} < 0,05$
- H_0 diterima jika $p \text{ value} > 0,05$

Penentuan kesimpulannya berdasarkan kriteria keputusan sebagai berikut:

- $H_0 : \beta = 0$ artinya penerapan *e*-SPT PPN tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.
- $H_a : \beta \neq 0$ artinya penerapan *e*-SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

3.7.1.2 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable X terhadap variable Y. Menurut Frisztado (2010), *Koefisiensi Determinasi (R^2)* adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh variable-variabel X secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y .

Jika R^2 semakin besar atau mendekati 1, maka model (variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel penjelas) makin tepat. Untuk data survey yang berarti bersifat *cross section* data yang diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai $R^2 = 0,2$ atau $0,3$ sudah cukup baik.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *e*-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT dilakukan analisis terhadap *koefisien determinasi (R^2)*.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Adapun yang menjadi Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercayadan dibanggakan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi Misi dari Direktorat Jenderal Pajak dilihat dari beberapa segi yaitu:

a. Segi Fiskal

Menghimpun penerimaan Dalam Negeri dan sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

b. Segi Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

c. Segi Politik

Mendukung proses demokratisasi.

4.2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya

4.2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya

Menurut Pandiangan (2007) dalam bukunya Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya sebagai salah satu

model organisasi, tugas pokok dan fungsi yang dimodernisasi, hingga saat ini belum semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memilikinya. Bila di pulau Jawa hampir semuanya Kantor Wilayah sudah ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, sedangkan di pulau Sumatera hanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka dan Belitung. Di Kalimantan hanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan di Sulawesi hanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara.

Tahapan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya adalah sebagai berikut:

1. Dengan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, khusus dimodernisasi, yakni atas:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan Usaha Milik Negara (kini masuk ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar)
 - b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing 1
 - c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing 2
 - d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing 3
 - e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing 4
 - f. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing 5
 - g. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing 6

- h. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing 1
 - i. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badan dan Orang Asing 2
 - j. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa
2. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat yang wilayah kerjanya meliputi kota Jakarta Pusat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya ini mulai beroperasi melayani Wajib Pajak pada tanggal 1 September 2004.
 3. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2005, dibentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam, yang mulai beroperasi pada 1 Februari 2006 dengan wilayah kerja meliputi wilayah Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.
 4. Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006, dibentuk:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, dengan wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau kecuali Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.
 - b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi Banten dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat.
 - c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bekasi, dengan wilayah kerja meliputi sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat.
 - d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Provinsi Bali.

Keempat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya ini mulai beroperasi melayani Wajib Pajak sejak tanggal 1 Juli 2006.

5. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006, dibentuk lagi 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, yaitu:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan, dengan wilayah kerja meliputi Kota Medan dan sekitarnya, yang kedudukannya di Medan.
 - b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kedudukannya di Palembang.
 - c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Barat, dengan wilayah kerja meliputi Kota Jakarta Barat.
 - d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur, dengan wilayah kerja meliputi Kota Jakarta Timur.
 - e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, dengan wilayah kerja meliputi Kota Jakarta Utara.
 - f. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan, dengan wilayah kerja meliputi Kota Jakarta Selatan.
 - g. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung, dengan wilayah kerja meliputi sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat, yang kedudukannya di Bandung.
 - h. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, dengan wilayah kerja meliputi sebagian wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang kedudukannya di Semarang.
 - i. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya, dengan wilayah kerja

meliputi kota Surabaya dan sekitarnya, yang kedudukannya di Surabaya.

- j. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo, dengan wilayah kerja meliputi sebagian wilayah Provinsi Jawa Timur, yang kedudukannya di Sidoarjo.
- k. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, dengan wilayah kerja meliputi sebagian wilayah Provinsi Jawa Timur, yang kedudukannya di Malang.
- l. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Balikpapan, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur, yang kedudukannya di Balikpapan.
- m. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, yang kedudukannya di Makassar.

Ke-13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di atas diresmikan pada tanggal 27 Desember 2006 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersamaan dengan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Sedangkan saat mulai operasinya melayani Wajib Pajak sejak tanggal 9 April 2007.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya mengelola Wajib Pajak besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah) dan juga terbatas jumlahnya. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya juga tidak ada kegiatan ekstensifikasi, jumlah Wajib Pajaknya sudah tetap sekitar 200-500 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Jika suatu saat ditambah, Wajib Pajak-nya berasal dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kantor Wilayah. Jenis pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Madya sama dengan pajak yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, yaitu hanya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

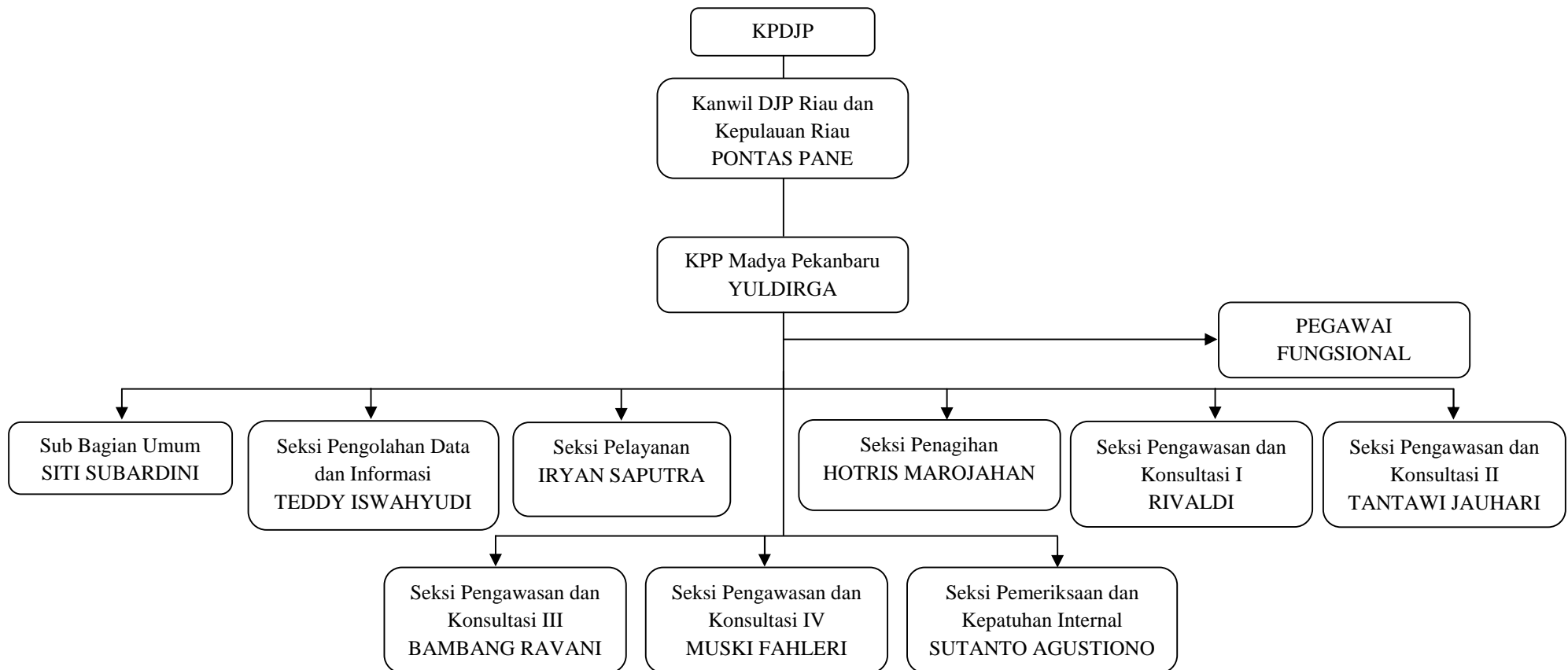
4.2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru.

Dilihat dari bentuk organisasi, maka wewenang tertinggi dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru berada pada Kepala Kantor merupakan pimpinan utama yang dibantu oleh para Kepala Seksi dan bagian-bagiannya. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, dan Kepala kantor melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Kepala Seksi.

Adapun Susunan Organisasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru

Keterangan:

1. Kepala KPP Madya	= 1	Pegawai
2. Pegawai Fungsional	= 36	Pegawai
3. Sub Bagian Umum	= 7	Pegawai
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi	= 1	Pegawai
5. Seksi Pelayanan	= 9	Pegawai
6. Seksi Penagihan	= 6	Pegawai
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	= 7	Pegawai
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	= 7	Pegawai
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	= 6	Pegawai
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	= 7	Pegawai
11. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	= 1	Pegawai

4.2.3 Uraian Jabatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru

Kantor Pelayanan Pajak Madya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewengannya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Adapun Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan

Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Riau.

2. Kelompok Pegawai Fungsional

Kelompok Pegawai Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun ketika melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak pemeriksa berhak memeriksa dokumen-dokumen akuntansi Wajib Pajak termasuk dokumen yang terdapat dalam *system computer*.

3. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurus segala urusan keuangan, sedangkan bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan

dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Pengawasan dan konsultan masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding. Tugas tersebut dilakukan oleh para *Account Representative*, yang menjembatani antara Wajib Pajak dan KPP.

8. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yaitu wajib pajak PPN yang datang melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru. Kuesioner disebarakan langsung oleh peneliti kepada responden.

Jumlah kuesioner yang disebarakan sebanyak 100 set. Dari jumlah kuesioner tersebut seluruh kuesioner kembali utuh tanpa ada kuesioner yang hangus, sehingga seluruh kuesioner dapat digunakan.

5.2 Pengujian Instrument Penelitian

5.2.1 Uji Kualitas Data

5.2.1.1 Uji Validitas

1. Variabel Penerapan *e*-SPT PPN

Hasil uji validitas terhadap variabel penerapan *e*-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Uji validitas Penerapan *e*-SPT PPN

Butir Pernyataan	r tabel	<i>Corrected Item-Total</i>	Keterangan
1	0,195	0,624	Valid
2	0,195	0,399	Valid
3	0,195	0,460	Valid
4	0,195	0,537	Valid
5	0,195	0,618	Valid
6	0,195	0,518	Valid

7	0,195	0,525	Valid
8	0,195	0,644	Valid
9	0,195	0,644	Valid
10	0,195	0,735	Valid
11	0,195	0,593	Valid
12	0,195	0,551	Valid
13	0,195	0,515	Valid
14	0,195	0,677	Valid

Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel 5.1 dapat dilihat uji validitas penerapan *e*-SPT PPN. Pada kolom ke-dua merupakan nilai kriteria. Dalam penelitian ini, kriteria yang diambil adalah 0,195. Sedangkan pada kolom ke-tiga adalah *Corrected Item Total*, yang merupakan realisasi perhitungan validitas data. Dari kolom ke-tiga terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan variabel penerapan *e*-SPT PPN lebih besar dari angka kriteria ($>0,195$). Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan variabel penerapan *e*-SPT PPN adalah valid dan layak untuk penelitian.

2. Variabel Efisiensi Pengisian SPT

Hasil uji validitas terhadap variabel efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Uji Validitas Efisiensi Pengisian SPT

Butir Pernyataan	r tabel	<i>Corrected Item-Total</i>	Keterangan
1	0,195	0,795	Valid
2	0,195	0,758	Valid
3	0,195	0,724	Valid
4	0,195	0,784	Valid
5	0,195	0,608	Valid
6	0,195	0,780	Valid

Sumber: Data Olahan 2013

Dari tabel 5.2 dapat dilihat uji validitas efisiensi pengisian SPT. Pada kolom ke-dua merupakan nilai kriteria. Dalam penelitian ini, kriteria yang diambil adalah 0,195. Sedangkan pada kolom ke-tiga adalah *Corrected Item Total*, yang merupakan realisasi perhitungan validitas data. Dari kolom ke-tiga terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan variabel efisiensi pengisian SPT lebih besar dari angka kriteria ($>0,195$). Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan variabel efisiensi pengisian SPT adalah valid dan layak untuk penelitian.

5.2.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan uji *cronbach alpha* dengan menggunakan SPSS. Suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai *cronbach alpha* $>0,6$ (Sekaran, 2006:177) dalam Lingga (2012). Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach alpha</i>	Keterangan
Penerapan <i>e</i> -SPT PPN	14	0,834	Reliabel
Efisiensi Pengisian SPT	6	0,836	Reliabel

Sumber: Data Olahan 2013

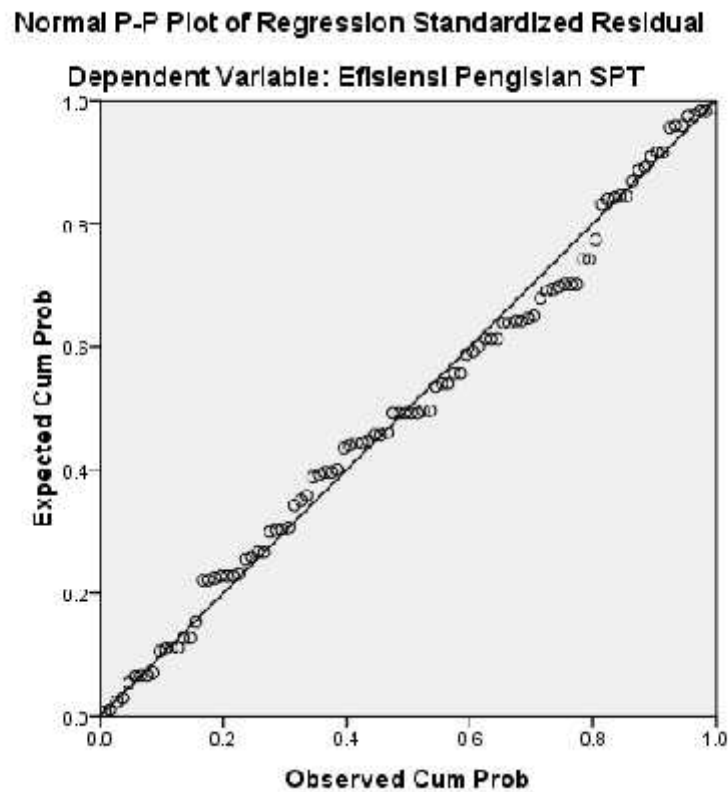
Dari tabel 5.3 uji reliabilitas pada kolom ke-dua merupakan jumlah item pernyataan dari setiap variabel, dimana variabel penerapan *e*-SPT PPN terdiri dari 14 pernyataan, dan variabel efisiensi pengisian SPT terdiri dari 6 pernyataan. Untuk kolom ke-tiga adalah *cronbach alpha* yang merupakan realisasi

perhitungan reabilitas data penelitian. Dari data kolom ke-tiga diperoleh hasil bahwa variabel penerapan *e*-SPT PPN mempunyai nilai *cronbach alpha* sebesar 0,834 dan untuk variabel efisiensi pengisian SPT mempunyai nilai *cronbach alpha* sebesar 0,836. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada masing-masing variabel adalah reliable atau handal, karena nilai *cronbach alpha* nya lebih besar dari 0,6 ($>0,6$)

5.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tes parametrik adalah pengamatan harus dilakukan pada populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah metode grafik normal *Probabiltiy Plot*. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus.

Gambar 5.1 Diagram (Normal P-P Plot)



Dari gambar di atas terlihat bahwa data tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus, dengan demikian dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi.

5.2.3 Uji Asumsi Klasik

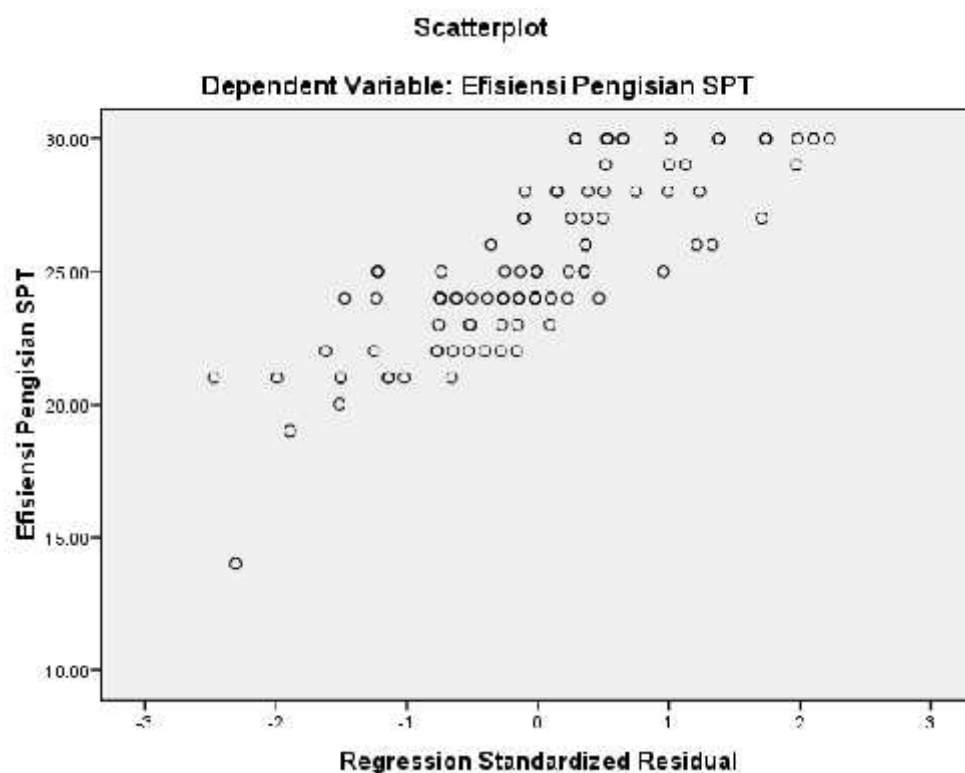
5.2.3.1 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas, tetapi jika tidak, maka terjadi heteroskedastisitas.

Metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot*. Analisis dari grafik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas).
2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 5.2 Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil grafik *scatterplot* yang menunjukkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi

heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

5.2.3.2 Uji Autokorelasi

Table 5.4 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.574 ^a	.329	.322	2.67071	1.899

a. Predictors: (Constant), Penerapan *e*-SPT PPN

b. Dependent Variable: Efisiensi Pengisian SPT

Sumber: Data Olahan 2013

Metode yang digunakan dalam mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan cara melihat uji Durbin-Watson. Hasil uji Durbin-Watson diperoleh hasil sebesar 1,899. Nilai Durbin-Watson berada diantara -2 sampai +2, jadi dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena bebas autokorelasi.

5.3 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan alat analisis regresi sederhana, karena dalam modelnya memasukkan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah variabel independen berhubungan positif atau negatif juga apakah nilai variabel telah signifikan atau tidak signifikan dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan atau penurunan. Dibawah ini adalah hasil pengujian

data dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS versi 16.0.

Tabel 5.5
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.566	2.719		2.415	.018
Penerapan <i>e</i> -SPT PPN	.324	.047	.574	6.932	.000

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengisian SPT

Sumber: Data Olahan 2013

Persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y' = 6,566 + 0,324X + e$$

Keterangan:

Y : efisiensi pengisian SPT

a : konstanta

X : penerapan *e*-SPT PPN

b : koefisien regresi

e : faktor pengganggu dari luar model

Persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 6,566; artinya jika pengaruh yang diperoleh dari penerapan *e*-SPT PPN (X) nilainya adalah 0, maka efisiensi pengisian SPT (Y) nilainya adalah 6,566.

- b. Koefisien regresi variabel penerapan *e*-SPT PPN (X) sebesar 0,324; artinya jika penerapan *e*-SPT PPN (X) mengalami kenaikan 1%, maka efisiensi pengisian SPT (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,324. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara penerapan *e*-SPT PPN dengan efisiensi pengisian SPT.

5.3.1 Pengujian Hipotesis (Uji-t)

H : Penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak

Tabel 5.6
Hasil uji t variabel Penerapan *e*-SPT PPN

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.566	2.719		2.415	.018
Penerapan <i>e</i> -SPT PPN	.324	.047	.574	6.932	.000

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengisian SPT

Dari tabel diatas, dapat diketahui nilai t_{hitung} nya adalah sebesar 6,932. Oleh karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,932 > 1,98$), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima.

Untuk variabel penerapan *e*-SPT PPN memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 (kecil dari $\alpha=5\%$). Artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

Hasil ini mendukung hipotesis yang diajukan, karena hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan *e*-SPT PPN mempengaruhi efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

5.3.2 Pengujian Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisiensi determinasi (R^2) dalam regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Berikut adalah tabel hasil perhitungan koefisiensi determinasi (R^2) dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0:

Tabel 5.7
Hasil Analisis Koefisiensi Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.322	2.67071

a. Predictors: (Constant), Penerapan *e*-SPT PPN

b. Dependent Variable: Efisiensi Pengisian SPT

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,329 atau 32,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (penerapan *e*-SPT PPN) terhadap variabel dependent (efisiensi pengisian SPT) sebesar 32,9% atau dibulatkan menjadi 33%. Sedangkan sisanya sebesar 67% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh penerapan *e*-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linier sederhana yang telah dijelaskan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa secara parsial penerapan *e*-SPT PPN mempunyai pengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak, yaitu tercermin dari nilai t_{hitung} variabel penerapan *e*-SPT PPN sebesar 6,932 dengan signifikan 0,000 (kecil dari $\alpha = 5\%$) dan t_{tabel} 1,98. Ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,932 > 1,98$). Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e*-SPT PPN berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

6.2 Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya terfokus pada wajib pajak PPN yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. Bagi peneliti selanjutnya perlu memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi

responden penelitian bukan hanya wajib pajak PPN tetapi juga meliputi wajib pajak PPh orang pribadi maupun badan.

2. Selain itu perlu diperluas pula indikator dari variabel penelitian khususnya mengenai efisiensi penerapan *e-SPT* PPN mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengisian SPT dipengaruhi oleh penerapan *e-SPT* PPN hanya sebesar 32,9%. Oleh karena itu saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah perlu memperluas variabel penelitian ditinjau dari aspek yang berbeda.

6.3 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui besarnya pengaruh penerapan *e-SPT* PPN terhadap efisiensi pengisian SPT hanya 32,9% atau 33%, maka saran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru ialah perlunya untuk lebih meningkatkan lagi penerapan *e-SPT* dalam semua aspek yang ada sehingga wajib pajak akan lebih memahami semua aspek dari penerapan *e-SPT* tersebut sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas *e-SPT* sebagai sarana pelaporan pajak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran. *Surat Al-Baqarah ayat 6*. PT. Syaamil Cipta Media.
- _____. *Surat Al-Isra' ayat 26-27*. PT. Syaamil Cipta Media.
- _____. *Surat An-Nisa ayat 59*. PT. Syaamil Cipta Media.
- _____. *Surat At-Taubah ayat 29*. PT. Syaamil Cipta Media.
- Enfar, Rahmania. 2011. *Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan menurut Persepsi Pegawai Pajak*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono. 2008. *SPSS 16.0 Analisis Data Statistika dan Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Guntur Alamsyah. 2011. *Analisis Pemungutan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
- Khairani, Siti. 2012. *Analisis Aplikasi e-SPT PPN pada Kantor Konsultan Pajak Maidy Palembang*. Jurnal Penelitian: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Maidy Palembang.
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung*. Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- _____. 2012. *Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya*. Laporan Penelitian: Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: CV. ANDI.

- Pandiangan, Liberti. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- PMK No. 152/PMK.03/2009 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Prasetyo, Bambang & Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pratiwi, Dhea Akadita. 2011. *Pengaruh Penerapan e-SPT dan e-Filling terhadap Kepuasan Wajib Pajak*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
- Purnama, Zahra. 2011. *Pengaruh Penerapan e-SPT dan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Badan) dalam Melaporkan SPT*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Nurul Afia. 2013. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Electronic (e-SPT) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Jurnal Penelitian: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sitompul, Veronika T. 2010. *Pengaruh Penerapan Elektronik SPT PPN (e-SPT PPN) terhadap Tingkat Kepuasan Pengusaha Kena Pajak Pengguna Aplikasi e-SPT PPN (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak di KPP Bandung Karees)*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Soemitro, Rochmat, dkk. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sripeni, Rusbiyanti. 2011. *Pengaruh Penerapan e-SPT (Masa PPN) terhadap Efisiensi Pengisian SPT (Masa PPN) menurut Persepsi Wajib Pajak*. Jurnal Penelitian: Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, dkk. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. ANDI.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ardiansyah, Muhammad Asrori. 2008. *Konsep Manajemen Dalam Perspektif Al-Qur'an*. URL: <http://alumnigontor.blogspot.com/2008/04/konsep-manajemen-dalam-perspektif-al.html>. diakses 01 Januari 2013.

Bakhtiar, Anggun. 2012. *Pengertian Urgensi*. URL: <http://anggunessay90.wordpress.com/2012/09/29/pengertian-urgensi/>. diakses 22 Desember 2012

Efelina. *Pengertian Persepsi - Definisi Persepsi*. URL: <http://blog.ub.ac.id/kumpulan/pengertian-persepsi-definisi-persepsi/>. diakses 17 September 2012.

Frisztado. 2010. *Koefisiensi Determinasi (R^2) & Uji F*. URL: <http://frisztado.wordpress.com/2010/11/05/koefisien-determinasi-r2-uji-f/>. diakses 26 Februari 2013.

Komara, Endang. 2009. *Disiplin Menurut Islam*. URL: <http://endangkomarasblog.blogspot.com/2009/03/disiplin-menurut-islam-oleh-h-endang.html>. diakses 30 Desember 2012.

Pajak Online. *Tata Cara Pelaporan dengan e-SPT*. URL: <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=99>. diakses 06 Desember 2012.

Wibisono, Agus. 2010. *Efektif dan Efisiensi*. URL: <http://www.aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisiensi/>. diakses 02 Desember 2012.

<http://www.kamusbesar.com/9732/efisiensi> diakses 2013

<http://www.kemenkeu.go.id> diakses 2013

<http://www.pajak.go.id/node/15> diakses 2013

BIOGRAFI



Peneliti bernama lengkap Siti Rabiah, dilahirkan di Bangsal Aceh, Dumai pada tanggal 06 November 1990, merupakan anak terakhir dari enam bersaudara, putri dari pasangan bapak Kallok dan ibu Lamming. Adapun jenjang pendidikan

formal yang telah dilalui peneliti adalah sebagai berikut:

Tahun 2003 : Menamatkan Sekolah Dasar di SDN 004 Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Tahun 2006 : Menamatkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 7 Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

Tahun 2009 : Menamatkan Sekolah Menengah Atas di SMAN Binsus Dumai, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.

Tahun 2013 : Menyelesaikan Pendidikan Tinggi di Jurusan S1 Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

No. HP : 0852 7178 1584